BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Hasnaul Jariyah** (2023), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul penelitian ***"Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara"***. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian di Kecamatan Banjang telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi kurangnya partisipasi sebagian masyarakat petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan, serta masih kurang optimalnya koordinasi antara penyuluh pertanian dan kelompok tani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyuluhan pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar hasil penyuluhan dapat lebih maksimal dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Faktor pendukung implementasi program penyuluhan pertanian meliputi adanya dukungan dari pemerintah

daerah, kompetensi penyuluh pertanian, serta kerja sama yang baik dengan kelompok tani. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung penyuluhan, dan kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya penyuluhan pertanian. Untuk meningkatkan kualitas implementasi program penyuluhan pertanian, disarankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan fasilitas dan sarana penyuluhan, memberikan pelatihan secara berkala kepada penyuluh pertanian, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dan kelompok tani. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teori dan indikator yang berbeda agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik dan lebih mendalam.

2. **Rahmat Hidayat** (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul penelitian ***"Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan"***. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan hasil penyuluhan oleh para petani, kurangnya intensitas kegiatan penyuluhan di beberapa desa, serta keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang menyebabkan penyampaian informasi belum merata kepada seluruh kelompok tani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program penyuluhan pertanian di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyuluhan pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh dinas terkait, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga hasil yang dicapai belum maksimal. Faktor pendukung implementasi program ini adalah adanya dukungan pemerintah daerah, keterlibatan kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan, serta adanya bantuan sarana produksi pertanian dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran kegiatan, kurangnya jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan, kondisi geografis wilayah yang cukup luas, serta rendahnya minat sebagian petani untuk mengikuti kegiatan penyuluhan secara rutin. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi program penyuluhan pertanian, disarankan kepada pemerintah daerah agar menambah jumlah tenaga penyuluh pertanian, meningkatkan frekuensi kegiatan penyuluhan di desa-desa, serta memperkuat pendampingan kepada kelompok tani agar pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara maksimal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan pendekatan dan indikator yang berbeda sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan Publik merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama yang diimpikan. Dalam konteks cita-cita Bangsa Indonesia, tujuan tersebut

adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan serta Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan publik mencakup segala prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, yang bersifat berdasarkan hukum, bukan sekadar pada kekuasaan (B. A. B. Ii & Pustaka, 2003).

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai panduan dalam menangani isuisu publik. Kebijakan ini memiliki tujuan, rencana, dan program yang jelas untuk dilaksanakan. (Africa, 2011).

Kebijakan merupakan produk dari pemerintahan dan administrasi negara, yang berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi tercapainya berbagai hasil. Oleh karena itu, kebijakan lebih dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dibandingkan dengan proses yang melahirkan hasil-hasil tersebut (Miftah Thoha, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang terjadi setelah penetapan Undang-Undang. Maksudnya, implementasi kebijakan mengacu pada pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan (Rondius, 2012).

Menurut Riant Nugroho implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam proses implementasi kebijakan publik, terdapat dua

pendekatan yang dapat diambil: pertama, melakukan implementasi secara langsung dalam bentuk program dan kedua, melalui formulasi kebijakan derivatif yang berfungsi sebagai penjelasan atau peraturan pelaksanaan dari kebijakan publik tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari sejauh mana pelaksanaan kebijakan sesuai dengan desain, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan ini juga tercermin dari dampak positif yang dihasilkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi ini, penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai, serta komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tersebut (Tangkilisan, 2004).

Keberhasilan implementasi juga memerlukan adanya mekanisme dan prosedur yang jelas di dalam lembaga. Hal ini akan meningkatkan peluang bagi pejabat-pejabat tingkat atas untuk mendorong bawahannya agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan kebijakan yang ada.

Model implementasi program yang diajukan oleh David C. Korten 1998 mencakup tiga elemen utama yang dirumuskan dalam konsep kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. Korten menekankan bahwa model ini terdiri dari tiga aspek kesesuaian yang melibatkan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran yang dituju oleh program tersebut.

Menurut Korten, keberhasilan suatu program tergantung pada adanya kesesuaian di antara ketiga unsur implementasi. Pertama, terdapat kesesuaian antara program dan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, penting untuk memastikan kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yakni kesesuaian antara tugas yang ditentukan oleh program dengan kemampuan organisasi yang melaksanakannya. Ketiga, kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana juga krusial, agar hasil yang dicapai oleh program dapat sejalan dengan apa yang mampu dilakukan oleh kelompok sasaran tersebut (Akib, 2010).

Menurut Leo Agustino (2017), implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh koordinasi antar pelaksana, komunikasi yang efektif, serta dukungan sumber daya yang memadai.

Menurut Sahya Anggara (2018), implementasi kebijakan merupakan aktivitas atau tindakan nyata yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menjalankan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

Menurut Budi Winarno (2016), implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan diuji apakah mampu mencapai tujuan yang diharapkan atau

tidak. Implementasi kebijakan memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat agar kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Menurut Subarsono (2019), implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan operasional yang melibatkan berbagai sumber daya, organisasi, serta aktivitas administrasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam implementasinya diperlukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut George C. Edward III dalam Nia Ramadhani (2025), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Sumber daya meliputi kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan lainnya. Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan pedoman pelaksanaan kebijakan.

2. Pengertian Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program didefinisikan sebagai sebuah rancangan yang mencakup prinsip dan usaha, baik dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, maupun aspek lainnya yang akan dilaksanakan. Program dapat diibaratkan sebagai suatu perintah yang ditujukan untuk melaksanakan fungsi atau tugas tertentu dengan tujuan yang

ingin dicapai. Setiap program dirancang secara spesifik dan dilengkapi dengan rangkaian instruksi yang mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurut Suharsimi Arikunto definisi program dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu definisi umum dan khusus. Dalam definisi umum, program dijelaskan sebagai rencana aktivitas yang akan dilaksanakan oleh individu di masa yang akan datang. Sementara itu, secara khusus, program diartikan sebagai evaluasi suatu unit atau kesatuan aktivitas yang merupakan hasil atau implementasi dari suatu kebijakan. Hal ini berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sedangkan Menurut John L. Herman menjelaskan bahwa program adalah suatu tindakan yang direncanakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh dan hasil di masa depan. Program juga dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat nyata (tangible), seperti materi kurikulum, maupun sesuatu yang tidak bersifat nyata (intangible) seperti prosedur atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk meningkatkan mutu peserta didiknya. Dalam melaksanakan suatu program, penting untuk terlebih dahulu memahami jenis-jenis program yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, termasuk tujuan, jenis, jangka waktu, sifat, serta ruang lingkup pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Umumnya, sebuah program terdiri dari serangkaian

kegiatan, dan untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya, penting untuk mempertimbangkan prosedur serta langkah-langkah yang harus diambil.

3. Peran Balai Penyuluhan Pertanian

Definisi penyuluhan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) menggambarkan penyuluhan sebagai suatu proses pembelajaran bagi para pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar mereka dapat membantu dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi mengenai pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, diharapkan penyuluhan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan mereka, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan (Yoyon, 2022).

Dalam definisi lain Istilah "penyuluhan" berasal dari kata "suluh," yang berarti obor atau pelita yang memberikan penerangan. Melalui proses ini, diharapkan terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Peningkatan pengetahuan ditandai dengan perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, serta dari yang sudah tahu menjadi lebih banyak tahu. Keterampilan dapat dikatakan meningkat jika individu yang awalnya tidak mampu melakukan suatu pekerjaan bermanfaat, kini menjadi mampu. Sementara itu, sikap dianggap berkembang jika seseorang yang awalnya tidak mau, berpindah menjadi mau memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam konsep implementasi kebijakan, penyuluh pertanian merupakan aktor pelaksana yang berperan penting dalam keberhasilan suatu program

pemerintah. Menurut Leo Agustino implementasi kebijakan merupakan proses aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyuluh pertanian memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan pemerintah di bidang pertanian kepada masyarakat petani.

Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, dan pendamping petani dalam meningkatkan kemampuan bertani. Program penyuluhan yang dilaksanakan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Menurut Marlinah dan Yuliana (2022), keberhasilan penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada petani sehingga petani mampu menerapkan pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan pertanian sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugasnya koordinator BPP dan penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi dan simplikasi baik di lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi secara fungsional mempunyai hubungan kerja (Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Penyuluhan Pertanian)

Peran BPP dalam kerangka Konstratani telah berkembang menjadi beberapa aspek penting, antara lain:

1. BPP berperan sebagai pusat data dan informasi untuk memastikan tersedianya data pertanian yang akurat.

2. Sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan pertanian, BPP melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap masyarakat tani.
3. BPP juga berperan sebagai pusat pembelajaran, dengan harapan hasil produksi padi dan panen lainnya dapat terus meningkat.
4. BPP menyediakan layanan konsultasi untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan wawasan para petani.
5. BPP berperan dalam membangun kerjasama dan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha serta pihak lain, guna mengembangkan bisnis di bidang pertanian.

C. Kerangka Pemikiran

Model implementasi program mencakup empat elemen utama yang dirumuskan dalam konsep kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. George C. Edward III menekankan bahwa model ini terdiri dari tiga aspek kesesuaian yang melibatkan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran yang dituju oleh program tersebut, diperlukan suatu indikator sebagai berikut yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Striktur Birokrasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

